ABSTRAK

Pembaruan hukum keluarga di Asia Tenggara, merupakan tema perenial yang menarik dan signifikan untuk diteliti. Diantara beberapa alasan yang mendasarinya; *Pertama*, Pluralisme budaya dan agama, Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya keragaman budaya dan agama. Penelitian ini memungkinkan kita memahami bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan tradisi lokal, dan bagaimana dinamika hukum keluarga. *Kedua*, Keadilan sosial: hukum keluarga Islam seringkali berkaitan dengan isu keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Meneliti pembaruan hukum, membantu mengidentifikasi upaya mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Ketiga, modernitas dan tradisi, pembaruan hukum keluarga merupakan refleksi ketegangan antara modernitas dan tradisi. Disertasi ini menggali bagaimana masyarakat Muslim Asia Tenggara menavigasi tantangan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional. Keempat, Globalisasi dan Interkonektivitas, era globalisasi, perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi norma-norma hukum. Disertasi ini meneliti konsekuensi logis interkonektivitas global terhadap pembaruan hukum keluarga di Asia Tenggara. Kelima, Politik dan kebijakan, hukum keluarga tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral, tetapi juga terpengaruh oleh kebijakan pemerintah dan dinamika politik. Memahami aspek ini membantu melihat bagaimana hukum keluarga dapat berubah sebagai respons terhadap tekanan politik dan sosial. Teori politik hukum sekaligus digunakan sebagai pisau analisis. Hasil disertasi diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam dan memberikan wawasan baru tentang penerapan hukum dalam konteks berbeda. Dengan memahami konteks akademis-filosofis, tema pembaruan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang perubahan sosial, budaya, dan hukum.

Dalam konteks disertasi ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah; (1) Bagaimana epistimologi pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam? (2) Bagaimana unifikasi pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam? (3) Bagaimana politik hukum pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam?

Penulisan disertasi menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan empiris hukum, dengan menggabungkan dua sumber data primer, peraturan perundangan-undangan dan hasil wawancara. Pendekatan penelitian etnografi digunakan untuk memotret setting sosial budaya pembentukan hukum keluarga. Analisis data dilakukan secara induktif dan terstruktur dari

epistimologi, unifikasi dan politik pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Asia Tenggara; Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Melalui analisis dialogis antara temuan penelitian dan teori politik hukum, dapat disimpulkan; Pertama, Pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam mengalami siklus **transisi epistemologis emansipatoris** interaksional. Artinya, epistemologi pembentukan dan pembaruan hukum keluarga tiga negara tersebut menunjukkan proses interaksi aspek hukum, dimensi sosial, budaya, dan politik. Upaya representasikan dimaksudkan untuk menjawab tantangan modernis kontemporer, seperti perubahan norma gender, kebutuhan akan keadilan sosial, dan pengaruh globalisasi. Epistemologi ini menegaskan bahwa hukum bukanlah entitas statis, tetapi entitas dinamis dimana pengetahuan dan interpretasi hukum terjalin berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan hukum dinamis-progresif. Pembaruan hukum keluarga juga menggambarkan dialog antara tradisi dan modernitas. Hukum tidak sekedar penegakan ketertiban, tetapi berfungsi sebagai potret nilai dan norma masyarakat yang terus berubah. Keberhasilan pembaruan hukum keluarga tidak hanya diukur dari segi normatif, tetapi juga dari seberapa baik hukum dapat merespons kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada keadilan sosial.

Kedua, unifikasi pembentukan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam bersumber dari hukum adat.budaya, hukum islam dan hukum barat. Ketiga sumber menjadi landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis falsafah dan konstitusi negara. Hal ini melahirkan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Akta 303 Tahun 1984 di Malaysia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 di Brunei Darussalam. Sedangkan unifikasi pembaruan hukum keluarga di Indonesia dilakukan pada tahun 1991 dengan terciptanya Kompilasi Hukum Islam, kemudian Fatwa DSN MUI Tahun 2012, dan Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terkait batas usia perkawinan. Malaysia melakukan unifikasi pembaruan pada Tahun 2005 sampai 2006 dan Brunei pada tahun 2002 dan 2012. Dari analisis unifikasi pembentukan dan pembaruan hukum keluarga ditemukan transnasionalisme transendental, teori yang menggabungkan elemen transnasionalisme dengan dimensi spiritual-transendental.

Ketiga, dari perspektif politik hukum, epistemologi pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki legitimasi, norma sosial dan konteks yang berbeda. Inisiatif reformasi dan pembaruan hukum keluarga dipengaruhi oleh tekanan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, gerakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Pembaruan hukum keluarga juga mencerminkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Analisis politik hukum dapat mengeksplorasi bagaimana hukum keluarga digunakan sebagai alat mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan, terutama terkait dengan gender dan hak-hak individu. Proses unifikasi dan pembaruan sering melibatkan negosiasi antara berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.

Maka dari persinggungan epistemologi, unifikasi dan politik hukum pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di ketiga negara tersebut, terciptalah teori baru epistemologi transendental emansipatoris. Teori ini menggabungkan elemen transnasionalisme dengan dimensi spiritual-transendental yang bersumber nilai-nilai adat, budaya dan agama serta modernisasi hukum barat yang mengedepankan hak-hak perempuan dan anak.

ABSTRACT

Family law reform in Southeast Asia is an exciting and significant perennial theme to research. Among several underlying reasons, First, Cultural and religious pluralism, Southeast Asia is a region rich in cultural and religious diversity. This research allows us to understand how Islamic values interact with local traditions and the dynamics of family law. Second, Social justice: Islamic family law is often related to issues of gender justice and the protection of the rights of women and children. Examining legal reforms helps identify efforts to achieve better social justice. Third, modernity and tradition, as well as family law reform, are reflections of the tension between modernity and tradition. This dissertation explores how Southeast Asian Muslim societies navigate modern challenges without ignoring traditional values. Fourth, globalization and interconnectivity, the era of globalization, and social and economic changes influence legal norms. This dissertation examines the logical consequences of global interconnectivity on family law reform in Southeast Asia. Fifth, Politics and policy, family law is not only related to moral values but is also influenced by Government policy and political dynamics. Understanding this aspect helps see how family law can change in response to political and social pressures. Legal political theory is also used as a tool for analysis. It is hoped that the results of the dissertation can contribute to the development of Islamic legal theory and provide new insights into the application of law in different contexts. By understanding the philosophical academic context, the theme of reforming Islamic family law in Southeast Asia is relevant and provides deep insight into social, cultural, and legal changes.

In the context of this dissertation, the problem formulation to be discussed is: (1) What is the epistemology of the formation and reform of family law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam? (2) How is the formation and reform of family law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam unified? (3) What are the legal politics of establishing and updating family law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam?

The dissertation uses qualitative and empirical legal approaches, combining two primary data sources: statutory regulations and interview results. An ethnographic research approach is used to photograph the socio-cultural setting for forming family law. Data analysis was carried out inductively and structured from epistemology, unification, and politics of the formation and reform of family law in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam.

Through dialogic analysis between research findings and legal and political theory, it can be concluded that the formation and reform of family law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam have experienced cycles of emancipatory epistemological transition interaction. This means that the epistemology of the formation and renewal of family law in the three countries shows a process of interaction between legal aspects and social, cultural, and political dimensions. Representation efforts are intended to address contemporary modernist challenges, such as changing gender norms, the need for social justice, and the influence of globalization. This epistemology emphasizes that law is not a static entity but a dynamic entity where knowledge and interpretation of law are continuously intertwined in an effort to realize dynamic-progressive law. Family law reform also represents a dialogue between tradition and modernity. Law does not just enforce order but functions as a portrait of society's values and norms, which are constantly changing. The success of family law reform is not only measured from a normative perspective but also by how well the law can respond to society's needs and contribute to social justice.

Second, the unification of the formation of family law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam originates from customary and cultural law, Islamic law, and Western law. These three sources form the philosophical, juridical, and sociological basis of the state's philosophy and constitution. This gave birth to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia, Deed 303 of 1984 in Malaysia, and Law Number 2 of 1999 in Brunei Darussalam. Meanwhile, the unification of family law reform in Indonesia was carried out in 1991 with the creation of the Compilation of Islamic Law, then the 2012 MUI DSN Fatwa, and the first amendment to Law Number 16 of 2019 regarding the age limit for marriage. Malaysia carried out reform unification from 2005 to 2006, and Brunei in 2002 and 2012. From the analysis of the unification of the formation and reform of family law, transcendental transnationalism was found, a theory that combines elements of transnationalism with spiritual-transcendental dimensions.

Third, from a legal and political perspective, the epistemology of the formation and renewal of family law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam has different legitimacy, social norms, and contexts. Family law reform and reform initiatives are influenced by pressure from civil society, non-governmental organizations, human rights, and gender equality movements. Reforms in family law also reflect power relations in society. Legal and political analysis can explore how family law is used as a tool to maintain or change power structures, especially in relation to gender and individual rights. The

process of unification and renewal often involves negotiations between various parties with different interests.

So, from the intersection of epistemology, unification, and legal politics of the formation and renewal of family law in these three countries, a new theory of emancipatory transcendental epistemology was created. This theory combines elements of transnationalism with a spiritual-transcendental dimension that originates from traditional, cultural, and religious values , as well as the modernization of Western law, which prioritizes the rights of women and children.

الملخص

يعد إصلاح قانون الأسرة في جنوب شرق آسيا موضوعًا مثيرًا للاهتمام وهامًا دائمًا للبحث. من بين عدة أسباب أساسية؛ أولا، التعددية الثقافية والدينية، جنوب شرق آسيا منطقة غنية بالتنوع الثقافي والديني. يتيح لنا هذا البحث فهم كيفية تفاعل القيم الإسلامية مع التقاليد المحلية، وديناميكيات قانون الأسرة. ثانياً، العدالة الاجتماعية: غالباً ما يرتبط قانون الأسرة الإسلامي بقضايا العدالة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة والطفل. إن دراسة الإصلاحات القانونية تساعد في تحديد الجهود المبذولة لتحقيق عدالة اجتماعية أفضل. ثالثا، الحداثة والتقاليد، إصلاح قانون الأسرة هو انعكاس للتوتر بين الحداثة والتقاليد. تستكشف هذه الأطروحة كيف تتغلب المجتمعات الإسلامية في جنوب شرق آسيا على التحديات الحديثة دون تجاهل القيم التقليدية. رابعا، العولمة والترابط، عصر العولمة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على القواعد القانونية. تبحث هذه الأطروحة في العواقب المنطقية للترابط العالمي على إصلاح قانون الأسرة في جنوب شرق آسيا. خامسا، السياسة والسياسة، لا يرتبط قانون الأسرة بالقيم الأخلاقية فحسب، بل يتأثر أيضا بسياسة الحكومة والديناميات السياسية. إن فهم هذا الجانب يساعد في معرفة كيف يمكن لقانون الأسرة أن يتغير استجابة للضغوط السياسية والاجتماعية. تُستخدم النظرية السياسية القانونية أيضًا كأداة للتحليل. ومن المأمول أن تساهم نتائج الأطروحة في تطوير النظرية القانونية الإسلامية وتقديم رؤى جديدة لتطبيق القانون في سياقات مختلفة. ومن خلال فهم السياق الأكاديمي الفلسفي، فإن موضوع إصلاح قانون الأسرة الإسلامي في جنوب شرق آسيا ليس ذا صلة فحسب، بل يوفر أيضًا نظرة عميقة للتغيرات الاجتماعية والثقافية والقانونية.

في سياق هذه الأطروحة، صياغة المشكلة التي سيتم مناقشتها هي؛ (1) ما هي نظرية المعرفة لتشكيل وإصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار السلام؟ (2) كيف يتم توحيد تشكيل وإصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار السلام؟

(3) ما هي السياسات القانونية لوضع وتحديث قانون الأسرة في إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار السلام؟

ومن خلال التحليل الحواري بين نتائج البحث والنظرية السياسية القانونية يمكن التوصل إلى استنتاج؛ أولاً، شهد تشكيل وإصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار السلام دورة من التحول المعرفي التحرري التفاعلي. وهذا يعني أن النظرية المعرفية لنشأة وتجديد قانون الأسرة في البلدان الثلاثة تظهر عملية تفاعل بين الجوانب القانونية والأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية. تهدف جهود التمثيل إلى معالجة التحديات الحداثية المعاصرة، مثل تغيير المعايير الجنسانية، والحاجة إلى العدالة الاجتماعية، وتأثير العولمة. تؤكد نظرية المعرفة هذه على أن القانون ليس كيانًا ثابتًا، ولكنه كيان ديناميكي حيث تتشابك المعرفة وتفسير القانون بشكل مستمر كمحاولة لتحقيق القانون الديناميكي التقدمي. ويمثل إصلاح قانون الأسرة أيضاً حواراً بين التقليد والحداثة. القانون لا يفرض النظام فحسب، بل يعمل كصورة لقيم المجتمع و أعرافه التي تتغير باستمرار. لا يُقاس نجاح إصلاح قانون الأسرة من منظور معياري فحسب، بل يُقاس أيضًا بمدى قدرة القانون على الاستجابة لاحتياجات المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ثانياً، ينبع توحيد تشكيل قانون الأسرة في إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار السلام من القانون العرفي والثقافي والشريعة الإسلامية والقانون الغربي. وتشكل هذه المصادر الثلاثة الأساس الفلسفي والقانوني والاجتماعي لفلسفة الدولة ودستورها. أدى ذلك إلى صدور القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج في إندونيسيا، والسند رقم 303 لعام 1984 في ماليزيا، والقانون رقم 2 لعام 1999 في بروناي دار السلام. وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ توحيد إصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا في عام 1991 من خلال إنشاء مجمع الشريعة الإسلامية، ثم فتوى MUI DSN لعام 2012، والتعديل الأول للقانون رقم 16 لعام 2019، فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج. قامت ماليزيا بإصلاح التوحيد في الفترة من 2005 إلى 2006 وبروناي في عامي 2002 و2012. ومن تحليل توحيد تشكيل

وإصلاح قانون الأسرة، تم العثور على التجاوزية العابرة للحدود الوطنية، وهي نظرية تجمع بين عناصر التجاوزية الوطنية والأبعاد الروحية المتعالية.

ثالثًا، من منظور سياسي قانوني، تتمتع نظرية تشكيل وتجديد قانون الأسرة في إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار السلام بشرعية وأعراف و سياقات اجتماعية مختلفة. تتأثر مبادرات إصلاح قانون الأسرة وإصلاحه بضغوط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وحركات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وتعكس الإصلاحات في قانون الأسرة أيضًا علاقات القوة في المجتمع. يمكن للتحليل السياسي القانوني استكشاف كيفية استخدام قانون الأسرة كأداة للحفاظ على هياكل السلطة أو تغييرها، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والفردية. غالبًا ما تتضمن عملية التوحيد والتجديد مفاوضات بين أطراف مختلفة ذات مصالح مختلفة.

لذا، فمن خلال تقاطع نظرية المعرفة والتوحيد والسياسة القانونية لتشكيل وتجديد قانون الأسرة في هذه البلدان الثلاثة، تم إنشاء نظرية جديدة لنظرية المعرفة التحررية المتعالية. تجمع هذه النظرية بين عناصر عابرة للحدود الوطنية مع البعد الروحي المتعالي الذي ينبع من القيم التقليدية والثقافية والدينية بالإضافة إلى تحديث القانون الغربي الذي يعطي الأولوية لحقوق المرأة والطفل.